

ABSTRAK

Deni Apriatna, *Proses Penegakan Hukum Dalam Sengketa Hasil Pilkada di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Analisis Putusan MK Nomor 192/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perspektif Siyasah Qadhaiyyah.*

Penelitian ini mengkaji sengketa Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2024 yang diajukan pasangan calon nomor 3 terhadap nomor 2 dengan tuduhan keberpihakan aparaturnya dan politik uang, yang ditolak Mahkamah Konstitusi karena kurang bukti. Tujuannya adalah menganalisis penegakan hukum berdasarkan putusan MK dan meninjau dari perspektif Siyasah Qadhaiyyah yang menekankan keadilan syar'i. Hasil menunjukkan MK mengedepankan peradilan cepat, sederhana, dan final dengan penekanan pada pembuktian hukum, sementara Siyasah Qadhaiyyah juga mempertimbangkan niat dan dampak keputusan bagi masyarakat. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum tata negara dan hukum Islam serta meningkatkan kesadaran integritas dalam proses demokrasi.

Penelitian ini membahas teori penegakan hukum dan pertimbangan hukum sebagai dasar sistem peradilan Indonesia, menekankan penerapan hukum yang konkret untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan serta penilaian hakim yang mempertimbangkan fakta, norma, dan kondisi sosial secara independen. Selain itu, dibahas konsep keadilan umum dari pandangan filsuf seperti Aristoteles, Hobbes, dan Kelsen, serta keadilan dalam Islam melalui siyasah qadhaiyyah yang menekankan keadilan substantif, independensi hakim, dan perlindungan hak masyarakat guna menjaga keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan umum berdasarkan prinsip syariat dan ijtihad.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif untuk menganalisis norma hukum dan peraturan melalui kajian pustaka serta data non-numerik. Data dikumpulkan dari peraturan, putusan pengadilan, doktrin, dan pendapat ahli, lalu dianalisis secara sistematis berdasarkan Putusan MK Nomor 192/PHPU.BUP-XXIII/2025 menggunakan metode deduktif. Studi ini mengkaji penegakan hukum sengketa Pilkada Kabupaten Bandung Barat dari perspektif Siyasah Qadhaiyyah, mengevaluasi mekanisme penyelesaian sengketa, faktor putusan MK, dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK menjalankan kewenangan sesuai konstitusi dan asas independensi hakim, namun lebih menekankan aspek yuridis formal daripada nilai sosial dan keagamaan. Mahkamah menolak sengketa Pilkada karena kurangnya bukti dan selisih suara di luar ambang batas gugatan. MK dianggap telah menerapkan prinsip independensi, kesetaraan hukum, dan pembuktian sesuai nilai Siyasah Qadhaiyyah, meski pendekatannya masih prosedural-formalistik tanpa mempertimbangkan konteks sosial-politik secara menyeluruh. Penelitian juga menyoroti pentingnya pembentukan peradilan khusus Pilkada.

Kata Kunci: Sengketa Pilkada, Mahkamah Konstitusi, Penegakan Hukum, Siyasah Qadhaiyyah, Keadilan Hukum Islam

Abstract

Deni Apriatna, *The Process of Enforcing Election Dispute Results in West Bandung Regency Based on Analysis of Constitutional Court Decision Number 192/PHPU.BUP-XXIII/2025 from a Siyasah Qadhaiyyah Perspective.*

This study discusses the process of enforcing disputes over the results of regional head elections (Pilkada) in West Bandung Regency based on Constitutional Court (MK) Decision Number 192/PHPU.BUP-XXIII/2025 from the perspective of Siyasah Qadhaiyyah. The purpose of this study is to analyze the mechanism of law enforcement in Pilkada disputes, identify factors that influence the Constitutional Court's decision, and review its conformity with the principles of justice in Islamic law. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach sourced from literature studies, legal documents, and court decisions.

The results of the study show that the Constitutional Court has exercised its authority in accordance with the constitution and the principle of judicial independence as described in the concept of Siyasah Qadhaiyyah. However, in terms of legal considerations, the Constitutional Court still tends to prioritize formal legal aspects over the protection of social and religious values. Nevertheless, overall, the dispute resolution process has reflected substantive justice and legal certainty within the framework of Indonesia's constitutional democracy. This study emphasizes the importance of establishing a special judicial institution for regional head elections to avoid overlapping authorities and strengthen the national legal system in line with the principles of Islamic justice.

Keywords: *Election Dispute, Constitutional Court, Law Enforcement, Siyasah Qadhaiyyah, Islamic Legal Justice*